

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Buku Pedoman Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektroniuk (e-KTP) di Indonesia, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, 2011.
- Fatkhurrohman, , 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Irman, *Sambutan Pengantar*, 2004 Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Administrasi Kependudukan Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara*, Depatemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Krishna D. Darumurti, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kementarian lingkungan hidup, Program Bangun Praja Edisi 3 – 2004 Menuju Kota Adipura, Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kewilayahan Kementerian Lingkungan hidup.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- MH HM Ismail, Cetakan I, *Menuju Pelayanan Prima, konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Program Sekolah Demokrasi Bekerjasama Dengan Avveroes press, Malang, 2010.
- Nugroho D, 2008, *Public Police*, Gramedia, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Renja Disdukcapil Kab. Pati Tahun 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- , 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sae niki, 2005, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, CV. Eko Jaya Mitra Utama, Jakarta.
- Sirajuddin, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Cita Intrans Selaras, Malang.
- Sondang P. Siagian, 1982, *Filsafat Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
- Perpres No. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
- Kepres No. 10 Tahun 2010 tentang Tim Pengarah;
- Permendagri No. 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik;
- Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Bupati Pati No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rician Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah.

Internet:

Gibson, <http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>, diunduh pada tanggal 30 Juli 2012.

Website Kabupaten Pati, <http://www1.patikab.go.id/instansi-daerah/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diunduh tanggal 22 Juni 2012.

Diunduh dari www.tentangpelayananpublik.blogspot.com pada tanggal 30 Agustus 2012.

Diunduh dari www.tentangpelayananpublik.blogspot.com pada tanggal 30 Agustus 2012.

Diunduh dari www.pkailan.com/pdf/standarpelayananpublik pada tanggal 30 Agustus 2012.

Diunduh dari <http://www.patikab.go.id/>, pada tanggal 30 Agustus 2012

